

**PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENANGGULANGAN NARKOBA DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



Oleh :

**AMELIA PUTRI
NIM. 07011281924070**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JUNI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENANGGULANGAN NARKOBA DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**AMELIA PUTRI
07011281924070**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 31 Mei 2023

Pembimbing



**Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110199401100**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**“PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENANGGULANGAN NARKOBA DI KOTA PALEMBANG”**

**Skripsi
Oleh :**

**AMELIA PUTRI
NIM. 07011281924070**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Juni 2023**

Pembimbing :

**Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005**

Penguji

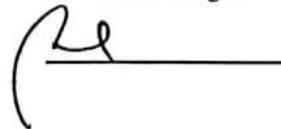
**3. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008021009**

**4. Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si
NIP. 199508142019032020**

Tanda Tangan



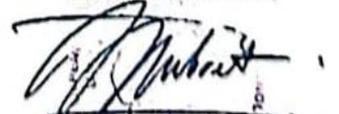
Tanda Tangan



Mengetahui.



**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amelia Putri
NIM : 07011281924070
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Narkoba di Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan daripihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, Mei 2023



Amelia Putri

NIM. 07011281924070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(Q.S. Yasin : 40)

Dengan ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua saya, Mama dan Papa
2. Saudara Laki-Laki dan Perempuan serta Keluarga Besar Saya
3. Seluruh Dosen dan Staff FISIP Universitas Sriwijaya
4. Sahabat-Sahabat Terbaik
5. Rekan Seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2019
6. Alamamater Kuning Kebanggaan, Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

This study aims to determine the Collaborative Governance process in dealing with drugs in Palembang City. Drug abuse and distribution in Palembang City is showing very worrying symptoms seen from the increasing number of rehabilitation patients. This study uses qualitative research with a descriptive approach. The theory used is the collaborative governance process model from Ansell and Gash (2007). Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. The results of this study show, 1) face-to-face dialogue between stakeholders is regularly held, 2) builds trust by communicating and being responsible for tasks, 3) commitment to the process with the aim of understanding the role of the organization, 4) mutual understanding by carrying out prevention activities, coordination and rehabilitation activities, 5) temporary results are good enough such as gaining public trust so that activities can run. The results of this study indicate that the process of collaborative governance in dealing with drugs in the city of Palembang has been quite optimal among stakeholders, but the private sector has not been fully involved.

Keywords : *Collaborative Governance, Countermeasures, Drugs.*

Advisor



Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005

Inderalaya, 31 May 2023

***Chairman of the Development of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
University of Sriwijaya***



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam penanggulangan narkoba di Kota Palembang. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Palembang menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan dilihat dari meningkatnya jumlah pasien rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu model proses *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) dialog tatap muka antar pemangku kepentingan rutin diadakan, 2) membangun kepercayaan dengan melakukan komunikasi dan bertanggung jawab dengan tugas, 3) komitmen terhadap proses dengan tujuan paham akan peran organisasi, 4) pemahaman bersama dengan melakukan kegiatan pencegahan, koordinasi dan kegiatan rehabilitasi, 5) hasil sementara sudah cukup baik seperti mendapatkan kepercayaan publik sehingga kegiatan dapat berjalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kota Palembang sudah cukup optimal antar pemangku kepentingan, namun pihak swasta belum sepenuhnya terlibat.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Penanggulangan, Narkoba.

Pembimbing



Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005

Inderalaya, 31 Mei 2023

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya dapat diberi kemudahan untuk menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Narkoba di Kota Palembang” dengan baik. Solawat serta salam tak lupa penulis tuturkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti saat ini. Penulisan usulan penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa, banyak kendala yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat pertolongan dari Allah SWT serta restu dari keluarga kendala tersebut dapat diatasi. Sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT yang telah memberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih kepada bapak atas ilmu, motivasi, dan bimbingan dalam proses menyusun laporan Usulan Penelitian.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

8. Terima kasih kepada orang tua tercinta mama dan papa yang selalu memberikan semangat dan tidak hentinya berdoa, berbisik pada bumi yang terdengar oleh langit agar anak-anaknya dapat sukses dunia dan akhirat.
9. Terima kasih kepada kakak-kakak dan adik saya tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman yang mendukung proses pembuatan skripsi ini GB Squad, Wak Dola, Treans dan saa yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan hingga tersusunnya skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2019.
12. Teman-teman seperjuangan almamater kuning kebanggaan Universitas Sriwijaya terimakasih atas kerjasamanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Apabila ada kekeliruan dalam penulisan kata penulis mohon maaf dan menerima saran dan kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 30 Maret 2023

Penulis

Amelia Putri

NIM. 07011281924070

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.2. Manajemen Publik	10
2.2.1. Collaborative	11
2.2.2. Governance	11
2.2.3. <i>Collaborative</i> Governanance	12
2.3. Penanggulangan Narkoba.....	16

2.4. Penelitian Terdahulu	25
2.5. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Definisi Konsep.....	35
3.3. Fokus Penelitian	37
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5. Informan Penelitian.....	40
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7. Teknik Analisis Data.....	43
3.8. Jadwal Penelitian.....	46
3.9. Sistematika Penulisan.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1 Kota Palembang	49
4.1.2 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan	53
4.1.3 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang.....	59
4.1.4 Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang.....	61
4.1.5 PT. Elnusa Petrofin Palembang.....	64
4.2. Deskripsi Informan Penelitian.....	65
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	66
4.3.1. Proses <i>Collaborative Governance</i>	66
BAB V PENUTUP.....	89
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

LAMPIRAN.....	95
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi Data Klien BNNP SumSel 2022.....	6
2. Penelitian Terdahulu.....	23
3. Fokus Penelitian.....	36
4. Informan Penelitian.....	43
5. Jadwal Penelitian.....	47

DAFTAR GAMBAR

1. Data Layanan Klinik Pratama 5 Tahun Terakhir.....	5
2. Teori Proses <i>Collaborative Governance</i>	14
3. Gambar Kerangka Penelitian.....	33
4. <i>Component of Data Analysis: Interactive Model</i>	41
5. Data Penandatanganan MoU.....	69
6. Sosialisasi BNN Prov. Sumsel bersama PT. Elnusa Petrofin Palembang.....	70
7. Visualisasi Data Dialog Tatap Muka.....	71
8. Visualisasi Data Membangun Kepercayaan	74
9. Visualisasi Data Komitmen Terhadap Proses.....	77
10. Kegiatan Rehabilitasi Pemulihan Bagi Anak Program Sekolah.....	80
11. Sosialisasi Badan Narkotika Nasional Prov. SumSel Kepada Remaja Masjid....	81
12. Visualisasi Data Pemahaman Bersama.....	82
13. Kegiatan Kampung Bersinar di 35 Ilir.....	86
14. Monitoring BNN ke Lembaga Rehabilitasi.....	86
15. Visualisasi Data Hasil Sementara.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1. Surat Tugas Skripsi.....	96
Lampiran2. Surat Izin Penelitian.....	97
Lampiran3. Surat Balasan Penelitian.....	101
Lampiran4. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian.....	103
Lampiran5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi.....	104
Lampiran6. Kartu Bimbingan Skripsi.....	105
Lampiran7. Lembar Perbaikan Komprehensif.....	106
Lampiran8. Peraturan Perundang – undangan.....	107
Lampiran9. Pedoman Wawancara.....	108
Lampiran10. Dokumentasi Wawancara.....	110

DAFTAR SINGKATAN

BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNK	: Badan Narkotika Nasional Kota
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
Narkoba	: Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya
P4GN	: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
Polrestabes	: Kepolisian Resor Kota Besar
<i>UNODC</i>	: <i>United Nations Office on Drugs and Crimes</i>
YPRN	: Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengonsumsian maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis (Ghoodse, 2002). Umumnya kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di kalangan remaja, hal itu disebabkan kurangnya edukasi serta tingkat literasi akan bahaya penggunaan narkoba oleh generasi muda.

World Drugs Reports 2021 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan pada tahun 2020 sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,5 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba setidaknya sekali dalam satu tahun terakhir sementara lebih dari 36 juta orang menderita gangguan penggunaan narkoba, hal ini berdampak pada pembangunan sektor kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung kepada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Terdapat 38 target SDGs di sektor kesehatan yang

perlu diwujudkan, penyalahgunaan narkotika dan alkohol menjadi salah satu permasalahan yang belum tuntas ditangani. Terdapat hubungan yang erat antara SDGs dan kebijakan narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 dimana peraturan undang-undang yang mengatur tentang Narkotika. Di dalam undang-undang tersebut banyak hal yang di bahas secara detail, seperti pengertian, golongan Narkotika, contoh pidana, dan lain sebagainya. Peraturan yang dibuat tentang narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, adanya ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum karena tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dapat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terjadi di lingkungan masyarakat telah menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini karena semakin meluasnya daerah penyebaran dan peredaran narkoba dan semakin beragamnya para pengguna narkoba di berbagai lapisan masyarakat, narkoba sendiri merupakan salah satu zat yang dapat merusak syaraf otak pada manusia sehingga memberikan efek ketergantungan kepada para penggunanya, apabila narkoba tidak digunakan secara benar maka akan menimbulkan bahaya bagi para penggunanya, bahkan dapat berakibat fatal bagi penggunanya yang berujung pada kematian. Dalam hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang disebut BNN (Badan Narkotika Nasional), BNN yang diidentifikasi sebagai forum *collaborative governance*. Dimana forum ini melibatkan berbagai pemangku kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks.

Dalam penanggulangan narkoba ini lebih optimal dengan melalui *collaborative governance*. Dengan melalui *collaborative governance* ini dapat mampu mengkomodirkan setiap upaya penanggulangan bencana, baik dari *stakeholder*, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana yang mendukung penanggulangan narkoba. Penanggulangan tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, namun tanggung jawab semua pihak. Dalam *collaborative governance* penanggulangan narkoba ini dapat meliputi pemerintah, swasta dan juga masyarakat agar bersama sama melakukan upaya penanggulangan narkoba agar menjadi lebih maksimal sehingga dilakukannya kolaboratif.

Collaborative Governance merupakan pemerintahan kolaboratif sebagai kegiatan formal yang melibatkan kegiatan bersama, struktur bersama dan sumber daya bersama. (Walter dan Peter dalam Ansell, Alison Cash 2008:546). Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008)

Narkoba merupakan permasalahan publik yang harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai aktor kebijakan, Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba para aktor terlibat dalam institusi pemerintah yaitu BNNP dan Kepolisian. BNNP memiliki peran penting yakni mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat akan dampak dari bahaya narkoba itu sendiri dan memberikan upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba. Kepolisian memiliki peran mensosialisasi pencegahan

penyalahgunaan narkoba dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi/menggunakan narkoba dikalangan masyarakat serta menindak pelaku penyalahgunaan narkoba.

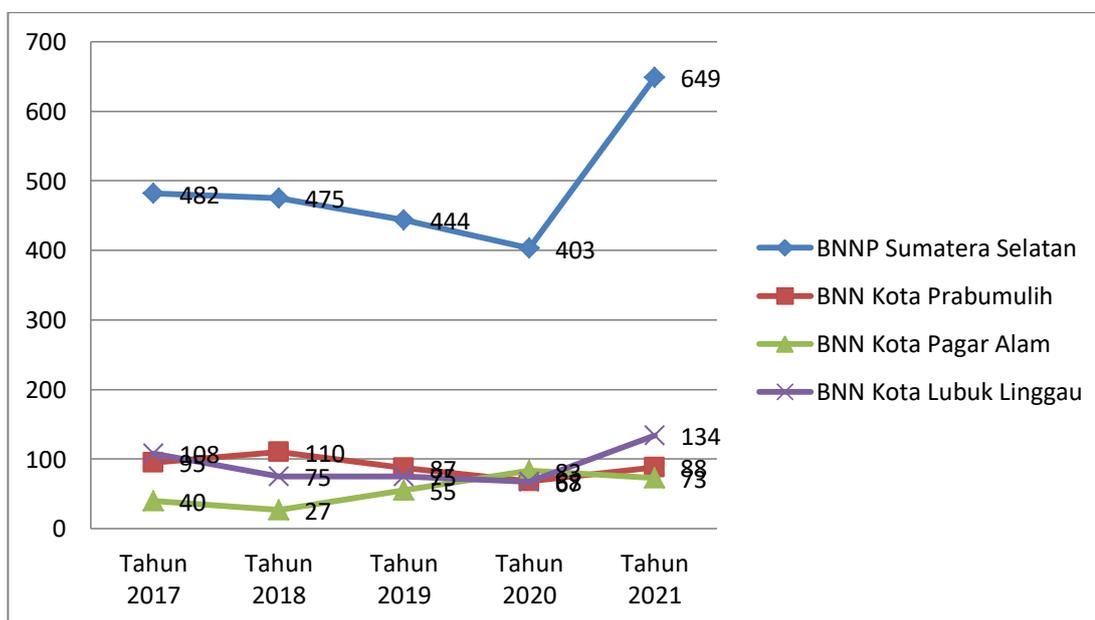
Adapun program yang telah dilakukan BNN dalam menangani penyalahgunaan narkoba yakni dibentuknya program Desa Bersih Narkoba (DESA BERSINAR). Tujuan dibentuknya program ini agar pemerintah desa/kampung memiliki keterlibatan dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kampanye nasional untuk memberantas peredaran obat-obatan terlarang yang telah menghambat laju proses pembangunan, merusak kesehatan masyarakat, keamanan dan keadilan, memperparah kemiskinan, kesenjangan, kekerasan dan diskriminasi, lebih banyak menimbulkan bencana bagi individu maupun masyarakat ketimbang produk yang hendak dikendalikannya, serta meninggalkan sejumlah kelompok masyarakat yang paling rentan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam “Indonesia *Drugs Report 2022*” mencatat telah terjadi peningkatan atau prevalensi penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2019 dan 2021. Hal tersebut ditunjukkan dengan data masyarakat pada tahun 2019 berjumlah 4,5 juta penduduk pernah pakai sedangkan 3,4 juta penduduk setahun pakai meningkat menjadi 4,8 juta pernah pakai dan 3,6 juta setahun pakai pada tahun 2021. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba oleh penduduk Indonesia meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021.

Berdasarkan survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021, lima jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi antara lain ganja; sabu, ekstaksi dan

amphetamine; nipam, pil koplo dan sejenisnya; dextro serta tembakau gorila. Mayoritas jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi antara lain ganja (59,1%), sabu (23,8%) dan dextro (4,3%). Rata-rata umur pertama kali menggunakan narkoba di wilayah pedesaan adalah 19 tahun sedangkan di wilayah perkotaan berusia 20 tahun. Selain itu resiko perempuan terpapar narkoba setahun terakhir mengalami peningkatan dari 0,20 persen pada 2019 menjadi 1,21 persen pada 2021. Selain itu, juga ada peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok umur 15-24 tahun dan 50-64 tahun di pedesaan. Seperti halnya di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sepanjang 2021 mencapai 5,5 persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 359.363 jiwa.

Gambar 1. Data Layanan Klinik Pratama 5 Tahun terakhir



Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1 mengindikasikan data layanan klinik pertama dalam 5 tahun terakhir yang diperoleh dari dokumentasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa BNNP Sumatera Selatan memiliki jumlah residen terbanyak serta terjadi peningkatan residen pada tahun 2017-2019. Jika dilihat dari data tersebut pada tahun 2021 jumlah residen di BNNP Sumatera Selatan berjumlah 649 orang dimana terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang meningkat di tahun 2021.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Klien BNNP SumSel 2022

No	Bulan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Januari	27	8
2.	Februari	7	0
3.	Maret	32	0
4.	April	22	3
5.	Mei	32	0
6.	Juni	34	0
7.	Juli	28	8
8.	Agustus	25	1
9.	September	53	6
	Jumlah	260	26

Sumber : Bidang Rehabilitasi BNNP Sumatera Selatan

Tabel 1 merupakan data rehabilitasi yang diperoleh dari dokumentasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pada data tabel tersebut masyarakat yang direhabilitasi pada tahun 2022 periode bulan Januari sampai dengan

September memiliki jumlah total residen sebanyak 286 orang, diantaranya 260 berjenis kelamin laki-laki dan 26 berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari data tersebut jumlah residen laki-laki lebih banyak dengan kata lain dapat dikategorikan penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang didominasi oleh kalangan laki-laki.

Permasalahan tingginya tingkat peredaran narkoba dan penggunaan narkoba di Kota Palembang memerlukan penanggulangan dan membutuhkan dukungan dari setiap aktor yang terlibat dan masyarakat harus turut serta. Pemerintah dalam hal ini BNNP sebagai aktor yang memiliki wewenang dalam melakukan penanggulangan bagi para penyalahguna narkoba menjadi beban besar apabila melakukan penanggulangan narkoba secara instansi sendiri. Dalam proses *collaborative governance* harus didukung oleh unsur-unsur terkait dilihat dari teori proses *collaborative governnace* Ansell & Gash (2008) yang terdiri dari, sebagai berikut;

1. *Face to face dialogue* atau dialog tatap muka
2. *Trust building* atau membangun kepercayaan
3. *Commitment to process* atau komitmen terhadap proses
4. *Shared understanding* atau pemahaman bersama
5. *Intermediate outcomes* atau hasil anantara/pertengahan

Oleh karena itu dengan adanya konsep kolaborasi dengan para aktor atau biasa disebut *collaborative governance* dimana dibutuhkan dalam aktivitas penanggulangan narkoba. Permasalahan ini dapat terselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak dan dibutuhkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Polrestabes Kota Palembang, Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rahman, PT. Elnusa Petrofin Palembang dan masyarakat.

Penelitian terkait *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba ini sudah banyak diteliti. Namun penelitian terkait penanggulangan narkoba di Kota Palembang masih terbatas. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti lihat, memiliki banyak perbedaan dan juga persamaan. Persamaan dalam studi *literature rievew* dengan penelitian peneliti yaitu, antara lain: semua penelitian terdahulu yang peneliti lihat mengguna jenis penelitian kualitatif, beberapa membahas terkait *collaborative governance* (Utami, Daniar (2018); Kismartini, et. al (2021); Latif, et. al (2022); Setia et al., n.d. (2022)). Selanjutnya perbedaan dalam studi *literature rievew* dengan penelitian peneliti dan sebagai pembaharuan yaitu, antara lain : fokus penelitian yaitu proses *collaborative governance* serta perbedaan pada lokusnya.

Berdasarkan dengan uraian permasalahan dan studi *literature rievew* mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini mencoba melihat masalah narkoba dengan menggunakan pendekatan proses *Collaborative Governance*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah memperoleh hasil akhir penelitian terkait proses *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kota Palembang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diberikan yakni.

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Proses *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kota Palembang.
2. Secara Praktis, dapat memberikan masukan bagi para stakeholder, khususnya dalam hal implementasi dilapangan terkait Proses *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti, Retno., Hardi Warsono dan Abd Rachim. (2020). *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Administrasi Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro Press.
- Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Nugraha, N. A., Purba, P. B., Komariyah, I., Purba, S., Tojiri, M. Y., Tjiptadi, D. D., Ashoer, M., Silalahi, M., & others. (2020). *Manajemen Sektor Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Wijaya, A. F., Danar, O. R., Press, U. B., Media, U. B., & Zauhari, S. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sugono, Deddy. (2008). *Kamus Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tarigan, Irwan Jasa. (2017). *Narkotikan Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Alifa, Ummu. (2019). *Apa Itu Narkotika Dan Napza*. Semarang : ALPRIN.
- Putri, Widha Utami. (2021). *Indonesia Drugs Report 2021*. Jakarta: Puslidatin BNN.
- Putri, Widha Utami. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Jakarta: Puslidatin BNN.

Jurnal

- Alim, B. N. (2022). Government Capability in Drug Control in East Kotawaringin Regency from The Dynamic Governance Perspective. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 8 (2), 157-168.

- Jusuf, H., Adityaningrum, A., Arsad, N. (2022). Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*. 141-150.
- Mudjrimin, J. (2022). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 58-70.
- Kismartini., Aiyub., Suwitri, S., Endang, L. (2021). Collaborative Governance in Drug Prevention in Lhokseumawe, Indonesia. *Atlantistis Press Sarl*, 495, 332–339.
- Latif, S. A., & Febrian, R. (2022). Collaborative Governance : Countering Narcotics Abuse in Indonesia. *Jurnal Of Governance*, 7(3), 678-686.
- Lubis, M. A. S., Ismaidar, I., & Lubis, S. (2022). Pemberdayaan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 207-222.
- Junaedi., Harakan, A., Idris, E. I. P. (2019). Kerjasama BNN Dan Kepolisian Dalam Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Moderat* 5(1), 81–95.
- Jeremy., Badrudin., Jumansyah. (2021). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba. *e-journal Pemerintahan Integratif*, 8(4), 1077–1087.

Setia, B., Nusa, P., Akbar, B., Djaenuri, A., & Lukman, S. (n.d.). Collaborative Governance Analysis in Eradication of Narcotics in the Province of the Special Capital Region of Jakarta. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal*, 5(1), 4715–4724.

Utami, D. R. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengendalian Narkoba Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–